

PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN LAMA MASA KERJA TERHADAP PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (SAPD) PADA KABUPATEN NGAWI DAN KABUPATEN PACITAN**BAGAS HARRIS PARANANDA** (bagasharris@gmail.com)PT. Wijaya Karya, Tbk.

ABSTRACT

The Government Regulation No. 71 of 2010 and the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 64 of 2013 requires local governments to use accrual accounting basis at Local Government Accounting System (SAPD). The implementation of accrual based accounting system in the Indonesian Government has its own problems in terms of human resources who do not have sufficient understanding of the accounting system to apply accrual accounting background due to inadequate education. Indonesian government practically only rely on experience working the financial staff to apply accrual based SAPD. This study aims to determine how much influence the quality of regional financial staff in terms of understanding of accounting, education level, and length of service of the application of accrual-based SAPD. The population in this research is the Local Government Unit (SKPD) in Ngawi and Pacitan. The data used in this study are primary data obtained through questionnaires and analyzed with multiple linear regression between the dependent and independent variables. These results indicate that the regional finance staff understanding of accounting affect the application of the SAPD, while the level of education and length of service does not affect the application of the SAPD.

Keywords: *Understanding of accounting, education level, length of service, the application SAPD*

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menuntut pemerintah daerah menggunakan basis akuntansi akrual pada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia memiliki permasalahan tersendiri dari sisi sumber daya manusia yang belum memiliki pemahaman akuntansi yang memadai untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dikarenakan latar belakang pendidikan yang kurang memadai. Praktis pemerintahan Indonesia hanya mengandalkan pengalaman bekerja para staf keuangan untuk menerapkan SAPD berbasis akrual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh kualitas staf keuangan daerah yang ditinjau dari pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, dan lama masa kerja terhadap penerapan SAPD berbasis akrual. Populasi dalam penelitian adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kemudian dianalisis dengan uji regresi linier berganda antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi staf keuangan daerah berpengaruh terhadap penerapan SAPD, sedangkan tingkat pendidikan dan lama masa kerja tidak berpengaruh terhadap penerapan SAPD.

Kata Kunci: Pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, lama masa kerja, penerapan SAPD

PENDAHULUAN

Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia pada tahun 2001 atas dasar Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemberlakuan otonomi daerah menuntut peran aktif daerah dalam mengelola dan

mengoptimalkan potensi daerah.

Otonomi daerah dalam bidang ekonomi memiliki dasar Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara. Pemberlakuan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, kredibilitas dan kinerja sektor publik di Indonesia.

Kinerja pemerintahan dan keterlibatan pihak swasta sebagai investor sangat berpengaruh pada pembangunan daerah sehingga diperlukan adanya suatu tata kelola yang baik (*good governance*). Usaha untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memperbaiki sistem pada bidang akuntansi maupun administrasi secara menyeluruh di negara maupun daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menjadi tonggak *good governance* pada bidang akuntansi di sektor pemerintahan. PP Nomor 71 menjadi dasar pemerintah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan basis akrual. Penggunaan SAP berbasis akrual di pemerintah daerah diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia memiliki beberapa tantangan untuk dihadapi antara lain sistem akuntansi, teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pemerintahan di Indonesia.

Sistem akuntansi pada tingkat pusat di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 Mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sedangkan pada tingkat daerah diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 Mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah didukung dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 232 yang mengatur Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD).

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengharuskan pemerintah mengacu pada SAP berbasis akrual dalam membuat sistem akuntansi pemerintah. Penerapan basis Akrual dalam akuntansi pemerintahan daerah menuntut adanya integrasi informasi yang cepat mengenai kondisi keuangan entitas pemerintah. Penerapan Teknologi Informasi akan mendukung penerapan

akuntansi berbasis akrual di Indonesia terutama dalam pengembangan sistem akuntansi.

Sumber daya manusia yang menjalankan serangkaian proses dan standar dalam akuntansi merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Sedikitnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi, sumber daya manusia yang relatif sudah tua, tingkat pendidikan yang beragam, kurangnya pelatihan tentang akuntansi bagi para staf, dan tidak adanya latar belakang akuntansi para staf menjadi salah satu permasalahan akuntansi di pemerintahan Indonesia.

Sektor pemerintahan Indonesia mengalami kekurangan tenaga akuntan yang jumlahnya berkisar 25.000 orang. Tenaga akuntan yang ada di pemerintahan cenderung bersifat terpusat dan tidak tersebar merata di daerah. Kabupaten Ngawi contohnya hanya memiliki dua akuntan padahal di daerah tersebut memiliki 54 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Kabupaten Pacitan memiliki kondisi lebih parah yang hanya memiliki satu akuntan dengan 53 SKPD. Dengan kondisi tersebut, praktis pemerintah Indonesia hanya mengandalkan pengalaman bekerja yang didapatkan dari lama masa kerja para staf keuangan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang keuangan. Kekurangan tenaga akuntan tentu saja akan menghambat kinerja pemerintahan terutama dalam mendapatkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diinginkan.

Menurut laporan pemeriksaan BPK pada semester I tahun 2013, terdapat 113 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau hanya 27% dan pada semester II tahun 2013 hanya terdapat 7 LKPD yang diberikan opini WTP dari 108 LKPD. Di Provinsi Jawa Timur terdapat 16 kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP dari BPK pada tahun 2013 termasuk Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan yang pada tahun sebelumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman akuntansi,

tingkat pendidikan, dan lama masa kerja staf keuangan daerah pada Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan terhadap penerapan SAPD.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur tentang sistem akuntansi pemerintah. Dalam PP Nomor 71 pasal 4 ayat 1 tertulis bahwa pemerintah harus menerapkan sistem akuntansi pemerintah yang berbasis akrual. Pemerintah yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 di dalam pasal 1 ayat 1 adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 1 ayat 8 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah sistem akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Dalam pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 PP Nomor 71 Tahun 2010 juga disebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah yang berbasis akrual dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. PSAP adalah sistem akuntansi pemerintah yang diberi judul, nomor, dan tanggal berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual disusun dan dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah dengan dasar Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mengatur tentang penerapan standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual pada pemerintahan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dibuat

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang sistem akuntansi pemerintah khususnya untuk pemerintah daerah. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ini dijelaskan bahwa yang dimaksud pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Permendagri ini melingkupi kebijakan akuntansi pemerintah daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), dan Bagan Akun Standar (BAS).

Dalam Pasal 4 dan 5 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dijelaskan bahwa kebijakan akuntansi pemerintah daerah berlaku pada entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah kemudian diatur lebih lanjut oleh peraturan kepala daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 mendefinisikan SAPD sebagai rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan. Dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dijelaskan bahwa SAPD memuat pilihan atas prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.

Halim dan Kusufi (2012) mengatakan bahwa SAPD secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu: Prosedur akuntansi penerimaan kas, Prosedur akuntansi pengeluaran kas, Prosedur akuntansi selain kas, Prosedur akuntansi asset.

Akuntansi Berbasis Akrual

Sistem akuntansi akrual menurut Halim

dan Kusufi (2012) adalah sistem pencatatan akuntansi yang mencatat pendapatan saat diperoleh dan mencatat beban saat terjadi tanpa melihat apakah kas telah diterima atau telah dibayarkan. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 mendefinisikan basis akrual sebagai basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis akuntansi akrual ini mengakibatkan harus diterapkannya sistem pencatatan berganda (*double entry systems*). Sistem pencatatan berganda adalah pencatatan yang melibatkan minimal dua akun dalam setiap pencatatan transaksi atau peristiwa yang mempengaruhi kondisi keuangan entitas.

Tingkat Pendidikan

Hasibuan (2008) mendefinisikan pendidikan sebagai keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan. Saputra (2002) menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka akan memiliki pengalaman intelektual yang tinggi dimana pengalaman intelektual akan mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki staf akan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik.

Lama Masa kerja

Nitisemito dalam Eriva *et al.* (2013) mendefinisikan masa kerja sebagai lamanya seseorang memberikan tenaganya pada perusahaan tertentu. Pengalaman kerja dibutuhkan untuk memberikan ilmu tambahan yang berguna untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Karyawan yang berpengalaman akan lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

Setyaningsih (2013) menyebutkan bahwa di pemerintah Kota Surakarta, sebanyak 75% aparatur pemerintah tidak memiliki suatu pemahaman yang memadai mengenai SAP tahun 2010 dan kemampuan menganalisis laporan keuangan yang sangat rendah sebesar 33%. Penelitian dengan hasil berbeda ditunjukkan oleh Halen dan Astuti (2013) yang menyebutkan bahwa tingkat pemahaman para staf keuangan di

pemerintahan Jember terhadap akrual basis berada pada kriteria yang baik. Perbedaan hasil penelitian ini karena dianggap setiap daerah memiliki kriteria pengelolaan keuangan daerah yang berbeda-beda.

Penerapan basis akrual dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia juga diikuti dengan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual. Opini WTP dari BPK pada tahun 2014 hanya diberikan kepada kurang dari 30% laporan keuangan pemerintah daerah. Hidayanti (2011) mengatakan bahwa sedikitnya opini WTP kepada pemerintah daerah disebabkan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dalam menangani fungsi akuntansi pada SKPD dan LKPD. Penelitian berbeda ditunjukkan oleh Widyaningsih *et al.* (2011) yang menjelaskan bahwa kualitas informasi laporan keuangan di Jawa Barat dalam kondisi yang baik, selain itu Sari dan Aprilia (2013) juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa sistem akuntansi di biro pengelolaan keuangan Provinsi Bengkulu juga pada kondisi yang baik. Hal tersebut menggambarkan adanya perbedaan kondisi sistem akuntansi daerah di Indonesia.

Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan dari sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang bagus dalam bidang akuntansi dan sistem akuntansi yang baik. Alshbiel dan Al-Awaqleh (2011) mengatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara sumber daya manusia dengan implementasi sistem akuntansi yang ada dalam rumah sakit di Yordania. Selain itu, Zhou (2010) mengatakan bahwa kualitas akuntansi masing - masing staf penting dalam menjalankan sistem akuntansi. Xu (2013) menjelaskan bahwa diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, berpengalaman, terampil, dan berpengetahuan mengenai teknis yang ada di bagiannya untuk mendapatkan sistem informasi akuntansi yang baik.

Chairunisah (2008) juga menjelaskan bahwa kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap relevansi informasi sebagai indikator kualitas informasi keuangan. Yuliani *et al.* (2010) menjelaskan bahwa pemahaman akuntansi dan pemanfaatan sistem akuntansi secara simultan berpengaruh pada laporan keuangan di Provin-

si Aceh. Afiah (2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa kompetensi staf keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat memiliki dampak yang signifikan terhadap penerapan sistem informasi akuntansi. Dengan kondisi tersebut dapat dipastikan bahwa kompetensi staf keuangan daerah berpengaruh dalam keberhasilan dan kelancaran sistem informasi akuntansi.

Penelitian berbeda dari Al-Hiyari *et al.* (2013) mengatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara SDM dengan sistem informasi akuntansi. Pelatihan akuntansi yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman akuntansi dan peningkatan SKPD juga dianggap tidak berpengaruh signifikan oleh Latifah dan Sabeni (2007).

Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh kapabilitas sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem tersebut. Kapabilitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Komara (2006) dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh positif kapabilitas sumber daya manusia terhadap penggunaan sistem. Muzahid (2014) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan staf keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Aceh Utara yang merupakan hasil dari pelaksanaan SAPD. Cahyadi (2009) dalam penelitiannya juga menyatakan terdapat pengaruh positif tingkat pendidikan dengan pemahaman laporan keuangan yang merupakan bagian dari penerapan SAPD.

Hal berbeda diungkapkan Kusuma (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat pendidikan staf tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual pada pemerintahan di wilayah kerja KPPN Semarang 1. Eriva *et al.* (2013) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan staf terhadap pemahaman laporan keuangan yang merupakan bagian dari proses penerapan SAPD.

Pengalaman kerja yang didapatkan dari masa kerja yang sudah lama akan memberikan ilmu terhadap para staf dalam melakukan pekerjaan. Ilmu dari pengala-

man kerja tentu saja akan mendukung penerapan SAPD. Muzahid (2014) membuktikan dalam penelitiannya bahwa lama masa kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang merupakan hasil dari penerapan SAPD. Charolina dan Abdullah (2013) juga mengemukakan bahwa lama masa kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang merupakan hasil dari penerapan SAPD. Cahyadi (2009) dalam penelitian juga menyatakan adanya pengaruh masa lama kerja terhadap pemahaman laporan keuangan.

Penelitian lain dari Eriva *et al.* (2013) mengemukakan bahwa lama masa kerja tidak berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan yang merupakan bagian dari penerapan SAPD. Maulia (2014) juga menjelaskan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari lama masa kerja terhadap kualitas laporan keuangan yang merupakan hasil dari penerapan SAPD.

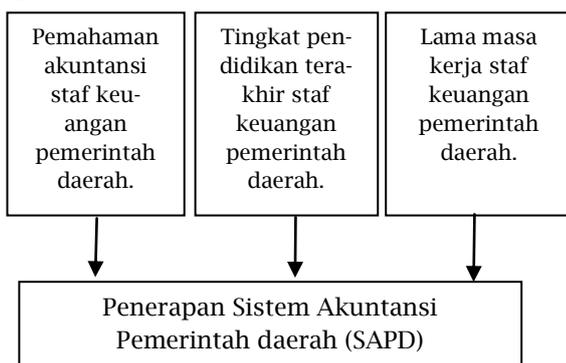
Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia membuat pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Kerja sama dengan pihak swasta dan kinerja badan usaha daerah juga akan mempengaruhi perkembangan daerah. Kondisi seperti itu membuat laporan keuangan menjadi salah satu hal yang sangat penting karena berpengaruh terhadap investasi pihak swasta dan penilaian kinerja pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintahan akan diperiksa oleh BPK selaku auditor pemerintah. BPK akan memberikan opini terkait laporan keuangan pemerintah yang bisa menjadi dasar tingkat kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang keuangan pemerintahan, dikeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Pemerintah diatur untuk menggunakan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan berhubungan dengan sumber daya manusia dan sistem akuntansi. Sumber daya manusia dan sistem akuntansi tidak dapat dipisahkan karena sumber daya manusia akan berperan untuk menjalankan operasional sistem akuntansi. Penggunaan

basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah menuntut adanya sumber daya manusia yang berkompoten dengan tingkat pendidikan yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan untuk menjalankan SAPD sehingga menghasilkan laporan keuangan yang baik.

Permasalahan penerapan basis akrual di pemerintah daerah adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang akuntansi. Sumber daya manusia yang dimiliki rata - rata berusia lanjut dan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi menjadi pertanyaan bagaimana tingkat pemahaman akuntansi para staf pemerintah daerah di bidang akuntansi terlebih dengan penerapan basis akrual. Kualitas sumber daya manusia yang kurang pada bidang akuntansi membuat pemerintah hanya mengandalkan pengalaman para pegawai yang telah lama bekerja untuk menerapkan SAPD di pemerintahan daerah.



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif eksplanatori. Menurut Sekaran (2006), penelitian eksplanatori bermaksud untuk memahami dengan lebih baik sifat masalah. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam *basic research*. Sekaran dan Bougie (2013) menjelaskan bahwa *basic research* adalah penelitian yang bertujuan menghasilkan pengetahuan atas suatu fenomena dan bagaimana suatu permasalahan di dalam organisasi dapat diselesaikan.

Penelitian ini akan menggunakan pengujian hipotesis. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh

pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, dan lama masa kerja staf pengelola keuangan daerah terhadap penerapan SAPD. Hipotesis Penelitian akan dianalisis menggunakan software statistic SPSS 20.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah staf pengelola keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di pemerintah Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan pendekatan *judgment sampling*.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subyek. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002) data subyek merupakan data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok yang menjadi obyek di dalam penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung dari sumber penelitian dengan media kuesioner. Kuesioner diisi oleh para responden yaitu staf pengelola keuangan SKPD pemerintah Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.

Skala yang digunakan dalam kuesioner menggunakan *semantic differential scale*. Menurut Hair *et al.* (2010) *semantic differential scale* digunakan untuk menilai persepsi atau sikap dari responden akan suatu hal. Skala yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan adalah skala rasio. Ghazali (2011) menjelaskan bahwa skala rasio adalah skala interval yang memiliki dasar yang tidak dapat dirubah, sedangkan skala yang digunakan untuk mengukur lama masa kerja adalah skala interval. Ghazali (2011) menjelaskan skala interval adalah urutan kategori yang menggambarkan tingkat preferensi yang sama.

Dilihat dari dimensi waktu, data dalam penelitian ini adalah *cross-section data*. Cross-section data menurut Gujarati (2004) adalah data dari satu variabel atau lebih yang dikumpulkan pada waktu yang sama. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2014 dan 2015.

Definisi Operasional dan dan Pengukuran Variabel

Pemahaman Akuntansi

Yuliani *et al.* (2010) mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan paham dalam bidang akuntansi apabila pandai dan telah mengerti proses berjalan sampai dengan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pemahaman akuntansi diuji menggunakan tiga *proxy* yaitu pemahaman umum SAP, Pemahaman struktur SAP, dan pemahaman sistem akuntansi. Pemahaman umum SAP dan pemahaman struktur SAP menggunakan kuesioner dari penelitian Setyaningsih (2013) dengan masing-masing 3 pertanyaan dan 10 pertanyaan. Pemahaman sistem akuntansi diuji dengan 6 pertanyaan yang diambil dari penelitian Usman dan Pakaya (2014).

Pendidikan Terakhir

Dewey (1964) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses dari pengalaman. Maulia (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka akan memiliki pengalaman intelektual yang tinggi dimana pengalaman intelektual akan mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki staf akan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik.

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu rata - rata tingkat pendidikan staf keuangan di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan. Untuk mengukur rata - rata tingkat pendidikan mengacu pada penelitian Kusuma (2013) dengan menggunakan rasio. Rumus rasio yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pendidikan} = \frac{(1 \times S2) + (0,6 \times S1) + (0,3 \times DP) + (0,1 \times SMA)}{S2 + S1 + DP + SMA}$$

Keterangan:

- S2 Jumlah staf dengan tingkat pendidikan pascasarjana (S2)
- S1 Jumlah staf dengan tingkat pendidikan sarjana (S1)
- DP Jumlah staf dengan tingkat pendidikan Diploma
- SMA Jumlah staf dengan tingkat pendidikan SMA

Metode rasio digunakan untuk mendapatkan skor dari tingkat pendidikan staf di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan.

Lama Masa kerja

Nitisemito (1996) mendefinisikan masa kerja sebagai lamanya seseorang memberikan tenaganya pada perusahaan tertentu. Pengalaman kerja dibutuhkan untuk memberikan ilmu tambahan yang berguna untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Karyawan yang berpengalaman akan lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

Pengukuran Pendidikan terakhir dalam penelitian ini menggunakan skala interval yang dikembangkan. Tabel skala penilaian lama masa kerja dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.

Skala Penilaian Lama Masa Kerja	
Rentang Lama Masa Kerja	Nilai
> 0 - 10 Tahun	1
11 - 20 Tahun	2
21 - 30 Tahun	3
31 - 40 Tahun	4

Penerapan SAPD

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Penerapan SAPD diuji dengan menggunakan kuesioner dari penelitian Rovyantie (2012) yang menggunakan 3 *proxy*, yaitu kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diuji dengan satu pertanyaan, prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan akuntansi yang berterima umum yang diuji dengan lima pertanyaan, dan pembuatan dan pelaporan laporan keuangan dilakukan secara periodik yang diuji dengan empat pertanyaan.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas dan validitas untuk mengetahui kelayakan kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian juga dilakukan pengujian asumsi klasik. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis satu sampai dengan hipotesis tiga menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$PSAPD = \alpha + PA + PTRKHR + LB = e$$

Keterangan

- PSAPD : Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
- PA : Pemahaman Akuntansi
- PTRKHR : Pendidikan Terakhir
- LB : Lama Bekerja
- e : *Error*

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden dan Pengujian Asumsi Klasik

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah SKPD di wilayah Kabupaten Pacitan dan Ngawi. Responden penelitian berasal dari berbagai instansi pemerintahan yang ada di kabupaten Pacitan dan Ngawi. Kabupaten Ngawi memiliki 54 SKPD dan Kabupaten Pacitan memiliki 53 SKPD. Berdasar kuesioner yang disebar, 61,81% kuesioner kembali atau sebanyak 139 kuesioner. Namun dari jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 139 kuesioner hanya 127 kuesioner yang terisi lengkap dan dapat

Tabel 2.
Demografi Responden

Keterangan	Jumlah (Orang)	Presentase
Jenis Kelamin		
Laki - laki	65	51,2%
Perempuan	62	48,8%
Usia		
20 - 30 tahun	6	4,7%
31 - 40 tahun	43	33,9%
41 - 50 tahun	42	33,1%
> 50 tahun	36	28,3%

dianalisis. Profil responden dapat dilihat pada Tabel 2,

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas instrument kuesioner dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh instrument kuesioner valid karena memiliki nilai diatas r tabel yang sebesar

Tabel 3.
Uji Validitas

	Cronbach's Alpha
PSAPD1	.909
PSAPD2	.899
PSAPD3	.900
PSAPD4	.899
PSAPD5	.903
PSAPD6	.904
PSAPD7	.896
PSAPD8	.898
PSAPD9	.895
PSAPD10	.899
PAKT1	.969
PAKT2	.969
PAKT3	.969
PAKT4	.968
PAKT5	.967
PAKT6	.968
PAKT7	.969
PAKT8	.968
PAKT9	.969
PAKT10	.968
PAKT11	.968
PAKT12	.968
PAKT13	.968
PAKT14	.968
PAKT15	.969
PAKT16	.968
PAKT17	.969
PAKT18	.968
PAKT19	.968

0,1466. Tabel perhitungan uji validitas tersaji pada Tabel 3.

Pengujian reliabilitas menggunakan teknik *Cronbach alpha* dalam penelitian ini menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,912 untuk variabel penerapan SAPD dan 0,970 untuk variabel pemahaman akuntansi.

Tabel 4.
Reliabilitas Penerapan SAPD

Variabel	Cronbach Alpha	N
Penerapan SAPD	.912	10
Pemahaman akuntansi	.970	19

Dengan hasil pengujian tersebut maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel, karena memiliki nilai lebih besar dari 0,6. Hasil uji reliabilitas pada Tabel 4. Selain itu data dalam penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Oleh karena itu pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda dapat dilakukan.

Pengujian Hipotesis

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan angka *adjusted R Square* sebesar 0,231, artinya pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, dan lama masa kerja mempengaruhi penerapan SAPD 23,1% sedangkan 76,9% dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk dalam model regresi. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 5.

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 13,591 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi dari hasil uji F <0,05 dan nilai F hitung >4 yang mengindikasikan model regresi penelitian layak digunakan dalam untuk memprediksi variabel dependen. Pemahaman akuntansi, pendidikan terakhir, dan lama masa kerja sebagai variabel independen berpengaruh

Tabel 5.
Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	10.51	3	3.503	13.591	.000 ^b
Residual	31.69	123	.258		
Total	42.21	126			

secara bersama – sama terhadap penerapan SAPD sebagai variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 5.

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil uji regresi berganda adalah $PSAPD = 3,103 + 0,309 \text{ PAKT} - 0,525 \text{ PTRKHR} - 0,050 \text{ LB} + e$. Berdasarkan hasil olah data, pendidikan terakhir dan lama bekerja memiliki nilai signifikansi >0,05. Oleh karena itu kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAPD.

Sedangkan variabel pemahaman akuntansi memiliki nilai signifikansi

Tabel 6.
Uji T

Model	Unstd Coef. B	Std. Coef. Error	Std. Coef. Beta	t	Sig.
1 (Constant)	3.103	.302		10.28	.000
PAKTT	.309	.053	.467	5.87	.000
Pendidikan Terakhir	-.525	.434	-.096	-1.21	.229
Lama Bekerja	-.050	.045	-.087	-1.11	.267

<0,05 sehingga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAPD. Hasil uji t tersaji didalam Tabel 6.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap penerapan SAPD

Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAPD. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel pemahaman akuntansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afiah (2009) yang menyebutkan bahwa kompetensi staf keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap sistem akuntansi. Hasil penelitian ini juga membuktikan teori dari Xu (2013) yang menjelaskan bahwa diperlukan SDM yang berkualitas untuk mendapatkan sistem informasi akuntansi yang baik.

Berdasarkan hasil pengolahan data menjelaskan bahwa penerapan SAPD lebih dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi para staf keuangan daerah daripada variabel independen lain yang digunakan dalam penelitian. Pemahaman akuntansi yang baik akan menjadi dasar yang kuat bagi para staf keuangan daerah untuk menerapkan SAPD dengan baik terlebih pada 2015 terdapat pergantian basis akuntansi dalam instansi pemerintah dari basis kas menjadi basis akrual yang akan mempengaruhi SAPD.

Pengaruh tingkat pendidikan terakhir terhadap penerapan SAPD

Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pendidikan terakhir tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAPD. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai signifikansi variabel tingkat pendidikan terakhir sebesar 0.229 yang lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Kusuma (2013) yang menemukan bahwa tingkat pendidikan terakhir staf keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan basis akrual yang merupakan dasar dari SAPD. Eriva *et al.* (2013) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan terakhir dengan kualitas laporan keuangan yang merupakan output dari SAPD.

Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa tidak semua staf keuangan yang memiliki pendidikan tinggi paham dalam penerapan SAPD. Staf keuangan yang memiliki jenjang pendidikan tinggi biasanya menempati posisi yang tinggi dimana tanggungjawabnya berada pada kebijakan dan bukan dalam pelaksanaan. Ilmu yang didapatkan dari pendidikan tinggi staf keuangan seringkali tidak diterapkan dalam pekerjaan yang dijalani. Sally dan Derajat (2004) menyatakan bahwa pendidikan tinggi yang diikuti oleh para birokrat lebih bertujuan untuk mendapatkan jabatan pada tingkat tertentu bukan untuk pengembangan pengetahuan dan ketrampilan pada pekerjaan yang dijalani.

Pengaruh Lama Masa Kerja terhadap Penerapan SAPD

Pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa lama masa kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAPD. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai signifikansi variabel lama masa kerja senilai 0,267 yang lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Eriva *et al.* (2013) yang menunjukkan bahwa lama masa kerja

tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan yang merupakan dasar dari penerapan SAPD. Maulia (2014) juga menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari lama masa kerja terhadap kualitas laporan keuangan yang merupakan hasil dari penerapan SAPD.

Peneliti menduga tidak adanya pengaruh yang signifikan antara lama masa kerja dengan penerapan SAPD dikarenakan SAPD yang digunakan merupakan SAPD yang baru dengan menggunakan basis akrual. Staf keuangan di instansi pemerintah lebih terbiasa dengan menggunakan kas basis yang telah lama digunakan sebelumnya. Sehingga pengalaman staf keuangan dalam menjalankan SAPD yang lama tidak banyak membantu penerapan SAPD dengan basis akrual apalagi basis akrual belum lama diterapkan di instansi pemerintah.

SIMPULAN

Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, dan lama masa kerja terhadap penerapan SAPD di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan dengan kesimpulan bahwa pemahaman akuntansi staf keuangan pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan SAPD di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan. Hal tersebut dikarenakan pemahaman akuntansi merupakan kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk menerapkan SAPD.

Tingkat pendidikan akhir dan lama masa kerja staf keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap penerapan SAPD di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan. Hal tersebut dikarenakan SAPD yang diterapkan merupakan SAPD baru yang menggunakan basis akrual.

KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi penerapan SAPD hanya menggunakan pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, dan lama masa kerja sebagai variabel independen.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan dengan sam-

pel penelitian staf keuangan pemerintah daerah dan belum melibatkan unsur - unsur yang terkait dengan penerapan SAPD lainnya seperti kepala bagian keuangan pemerintahan daerah dan anggota dewan.

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah Penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor - faktor lain yang mempengaruhi penerapan SAPD sebagai variabel penelitian sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan staf keuangan daerah sebagai responden tetapi melibatkan lebih banyak responden yang berkaitan dengan penerapan SAPD seperti kepala bagian keuangan pemerintah daerah dan anggota dewan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N. N. 2009. Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD dan Kompetensi Aparatur Daerah Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi. *Research Days, Faculty of Economics - Padjajaran University*, Bandung.
- Al-Hiyari, A. et al. 2013. Factors that Effect Accounting Information System Implementation and Accounting Information Quality: A Survey in University Utara Malaysia. *American Journal of Economics*, 3(1): 27-31.
- ALshbiel, S. O. dan Q. A. Al-Awaqleh. (2011), Factors Affecting the Applicability of the Computerized Accounting System. *International Research Journal of Finance and Economics*, 64: 36-53.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) Semester I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2013
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) Semester II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2013
- Cahyadi, D. 2009. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan, dan Posisi di Pemerintahan Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah: Studi Empiris pada Eksekutif dan Legislatif di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara*. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Charolina, O. dan H. Abdullah. 2013. Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum. *Jurnal Fairness*, 3(3): 82-94.
- Choirunisah, F. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi: Studi pada satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang Tahun 2008*. Tesis, Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Dewey, J. 1964. *Democracy and Education*. New York: The Macmillan Company.
- Eriva, C.Y., Islahuddin dan Darawanis. 2013. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Masa Kerja, dan Jabatan Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah: Studi pada Pemerintah Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(2): 1-14.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. 2004. *Basic Econometric*. 4ed. New York: Mc Graw-Hill Companies.
- Hair, J. F. et al. 2010. *Multivariate Data Analysis*. 7ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Halen dan D. D. Astuti. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pelatihan, dan Pendampingan aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Accrual Basis dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jember: Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi - Mandala Jember*, 98 - 119.
- Halim, A. dan S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hasibuan, M. S. P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hidayanti, E. 2011. Implementasi System Akuntansi Pemerintah Daerah di Era OTODA. *Jurnal WIGA*, 2(2).
- Indriantoro, N dan B. Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.Kementerian Dalam Negeri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
- Kementerian Dalam Negeri. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- Kementerian Keuangan. 2005. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Komara, A. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Maksi*, 6(2): 143-160.
- Kusuma, M. I. Y. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Latifah, L. dan A. Sabeni. 2007. *Faktor Keprilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar, Indonesia.
- Maulia, S.T. 2014. *Pengaruh Usia, Pengalaman, dan Pendidikan Dewan Komisaris Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muzahid, M. 2014. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerinah Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi*, 2 (2): 179 - 196.
- Nitisemito, A. S. 1996. *Manajemen Personalia: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gholia Indonesia.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Roviyantie, D. 2012. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Kabupaten Tasikmalaya)*. Working Papr, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Siliwangi.
- Saputra, A. D. I. 2002. *Membangun Manusia Indonesia*. Prosiding Simposium Kebudayaan Indonesia - Malaysia Kedelapan(SKIM 8), UKM Bangi.
- Sally, R. M dan W. S. Derajat. 2004. *Pengembangan Pegawai untuk Birokrasi*

- yang Good Governance dalam Ambar Teguh Sulistiyani (Ed.), Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Gava Media.
- Sari, E. dan S. N. Aprilia. 2013. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(3): 19-29.
- Sekaran, U. 2006. *Research Methods for Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. dan Bougie, R. 2013. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. 8ed. Eight UK: Jhon Wiley & Son Inc.
- Setyaningsih, T. 2013. *Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrua: Kasus di Pemerintah Kota Surakarta*. Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, Indonesia.
- Usman dan L. Pakaya. 2014. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Skpd Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. Penelitian Kolaboratif Dana BLU FEB, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.
- Widyaningsih, A., A. Triantoro dan L. S. Wiyantoro. 2011. *Hubungan Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening*. Simposium Nasional Akuntansi XIV, Aceh, Indonesia.
- Xu, H. 2003. *Critical Success Factors for Accounting Information Systems Data Quality*. Dissertation, University of Southern Queensland, Queensland.
- Yuliani, S., Nadirsyah dan U. Bakar. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 3(2): 206-220.
- Zhou, L. 2010. The Research on Issue and